

ISSN 2828-285x



POLICY BRIEF

PERTANIAN, KELAUTAN, DAN BIOSAINS TROPIKA Vol. 7 No. 4 Tahun 2025

Sinergi Komunikasi Keluarga, Kader, dan Pemerintah dengan Pendekatan Ekologi Sosial untuk Pencegahan Stunting

Penulis

Susri Adeni ¹, Sarwititi Sarwoprasodjo ², Mudrikatul Jannah Djibu ³, Ivone Mada Injili Papuani Bisararisi ³

¹ Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, IPB University

² Departemen Sainsi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, IPB University

³ Program Studi Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, IPB University

Sinergi Komunikasi Keluarga, Kader, dan Pemerintah dengan Pendekatan Ekologi Sosial untuk Pencegahan Stunting

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut:

- 1) Penurunan stunting masih terhambat karena komunikasi kesehatan masih bersifat satu arah dan *top-down*.
- 2) Program stunting belum optimal memanfaatkan potensi sosial desa sebagai ruang perubahan perilaku.
- 3) Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program stunting di tingkat daerah umumnya belum mengintegrasikan strategi komunikasi multilevel.
- 4) Tanpa strategi komunikasi multilevel, kebijakan stunting berisiko menjadi administratif tanpa transformasi sosial nyata.

Ringkasan

Penurunan stunting memerlukan lebih dari sekadar intervensi gizi, salah satunya dibutuhkan perubahan perilaku sosial yang dimulai dari komunikasi yang efektif. Hasil penelitian di Desa Gedepangrango, Sukabumi, menunjukkan bahwa keluarga dengan komunikasi terbuka dan kader dengan pendekatan empatik lebih berhasil membentuk perilaku pengasuhan sehat. Namun, pesan kesehatan sering terhenti di tingkat individu karena lemahnya koordinasi sosial dan kebijakan yang belum mendukung komunikasi lintas level. Pendekatan *Social Ecological Model* menawarkan solusi dengan membangun sinergi antara keluarga, kader, komunitas, dan kebijakan desa. Pemerintah daerah dan desa perlu mengintegrasikan strategi komunikasi multilevel ke dalam Rencana Aksi Stunting, memperkuat pelatihan komunikasi bagi kader, serta mendorong terbentuknya forum komunikasi komunitas sehat. Dengan menempatkan komunikasi sebagai inti kebijakan, percepatan penurunan stunting dapat berlangsung lebih partisipatif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan anak-anak Indonesia.

Kata Kunci: Komunikasi keluarga, model ekologi sosial, perubahan perilaku, stunting

Pendahuluan

Pendekatan kebijakan pencegahan stunting di Indonesia hingga saat ini belum sepenuhnya efektif dalam mendorong perubahan perilaku keluarga, meskipun berbagai program dan indikator layanan telah dijalankan secara luas. Hal ini tercermin dari masih tingginya prevalensi stunting nasional yang mencapai 19,8% berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka yang masih melampaui ambang batas yang direkomendasikan WHO (Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia 2025). Kesenjangan capaian semakin nyata di tingkat daerah, termasuk Kabupaten Sukabumi yang mencatat prevalensi stunting sebesar 27,05%. Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan stunting secara nasional belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas kebijakan di tingkat lokal.

Salah satu kelemahan utama dalam kebijakan pencegahan stunting saat ini adalah pendekatan komunikasi kesehatan yang masih bersifat informatif, satu arah, dan *top-down*. Program stunting cenderung menekankan pemenuhan indikator layanan dan pelaporan administratif, sementara perubahan perilaku keluarga sebagai aktor utama pemenuhan gizi dan pengasuhan anak belum ditangani secara sistematis. Akibatnya, pesan kesehatan sering kali tidak terinternalisasi dalam praktik sehari-hari keluarga, terutama di wilayah pedesaan dengan keterbatasan sumber daya dan kuatnya pengaruh norma sosial.

Penelitian yang dilakukan di Desa Gedepangrango, Kabupaten Sukabumi, menunjukkan bahwa komunikasi keluarga dan kader Posyandu berperan sentral dalam membentuk praktik pengasuhan dan perilaku makan anak. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menegaskan peran penting keluarga dalam pencegahan stunting (Fajar *et al.* 2024), dan komunikasi interpersonal oleh kader Posyandu berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam mengatasi gizi buruk (Febrian dan Rohmah 2025). Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa perubahan perilaku keluarga tidak dapat

dicapai hanya melalui penyampaian informasi, melainkan membutuhkan interaksi interpersonal yang berkelanjutan, empatik, dan kontekstual. Sehingga, perlu adanya pergeseran strategi pencegahan stunting dari pendekatan komunikasi satu arah menuju penguatan kapasitas komunikasi kader dan pelibatan keluarga sebagai subjek utama perubahan. Tanpa integrasi strategi komunikasi interpersonal ke dalam kebijakan dan perencanaan desa, intervensi stunting berisiko berhenti pada kepatuhan administratif tanpa menghasilkan transformasi sosial yang berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, pendekatan ekologi sosial (*Social Ecological Model*) menjadi kerangka penting dalam memahami dan menata kembali strategi komunikasi stunting. Pendekatan ini memandang perilaku manusia, termasuk perilaku pengasuhan dan gizi keluarga, sebagai hasil interaksi dinamis antara individu, keluarga, komunitas, organisasi, dan kebijakan publik (McLeroy *et al.* 1988). Dengan demikian, diperlukan inovasi kebijakan berbasis bukti terkait penerapan pendekatan ekologi sosial dalam strategi komunikasi stunting, dengan fokus pada penguatan kapasitas komunikasi keluarga, peningkatan kompetensi kader Posyandu, pembentukan koalisi komunikasi komunitas sehat, serta integrasi strategi komunikasi multilevel ke dalam perencanaan kebijakan dan penggunaan dana desa.

Komunikasi Keluarga dan Perubahan Perilaku

Perilaku pengasuhan dan gizi keluarga merupakan fondasi utama dalam pencegahan stunting. Namun, perubahan perilaku di tingkat rumah tangga tidak dapat hanya bergantung pada peningkatan pengetahuan, melainkan juga pada kualitas komunikasi di dalam keluarga. Hasil penelitian di Desa Gedepangrango menunjukkan bahwa keluarga dengan pola komunikasi yang terbuka, dua arah, dan empatik memiliki kesadaran gizi yang lebih tinggi dibandingkan keluarga yang komunikasinya bersifat instruktif dan hierarkis. Dalam keluarga yang komunikatif, ibu cenderung lebih aktif mendiskusikan kebutuhan makan anak dengan ayah dan anggota keluarga lain, serta lebih

konsisten dalam menerapkan perilaku gizi seimbang.

Komunikasi dalam keluarga berperan sebagai mediator antara pengetahuan dan tindakan. Informasi tentang gizi, pola makan, dan perawatan anak yang diperoleh dari Posyandu atau media kesehatan akan lebih mudah diinternalisasi ketika keluarga memiliki budaya komunikasi yang positif, yaitu kebiasaan mendengarkan, berdiskusi, dan mengambil keputusan bersama. Oleh karena itu, intervensi komunikasi program stunting sebaiknya tidak hanya berfokus pada penyampaian pesan. Program juga perlu memperkuat kapasitas komunikasi keluarga, misalnya melalui pelatihan literasi gizi berbasis komunikasi interpersonal.

Peran Kader dan Komunitas dalam Komunikasi Sosial

Kader Posyandu memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara sistem kesehatan formal dan keluarga. Namun, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan kader dalam memengaruhi perilaku keluarga sangat bergantung pada cara mereka berkomunikasi. Kader yang menggunakan pendekatan interpersonal dengan *storytelling*, empati, dan keteladanan cenderung lebih berhasil dalam mengubah perilaku keluarga dibandingkan dengan kader yang hanya menyampaikan pesan normatif. Pendekatan komunikasi yang personal membuat pesan kesehatan terasa lebih relevan dan membangun kepercayaan antara kader dan masyarakat. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian sebelumnya yang menemukan adanya peningkatan pengetahuan dan sikap keluarga setelah mendapatkan intervensi komunikasi interpersonal dengan pendekatan keluarga (Hidayat *et al.* 2023). Temuan tersebut menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang bersifat langsung dan dialogis merupakan cara yang paling efektif untuk mendorong perubahan perilaku kesehatan di tingkat rumah tangga.

Di tingkat komunitas, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan PKK berperan besar dalam memperkuat pesan yang disampaikan kader. Ketika pesan gizi dan pola asuh sehat diulang melalui kegiatan sosial, keagamaan, atau arisan warga,

pesan tersebut menjadi bagian dari norma sosial komunitas. Hal inilah yang menjadi esensi dari komunikasi sosial, yakni pesan kesehatan tidak berhenti di individu, tetapi menjadi budaya yang hidup dalam jaringan sosial masyarakat.

Namun demikian, koordinasi lintas aktor di tingkat komunitas masih terbatas. Banyak kader belum mendapatkan pelatihan komunikasi interpersonal yang memadai, dan kolaborasi antar-lembaga sering bersifat sporadis. Diperlukan koalisi komunikasi komunitas sehat, seperti forum lintas peran (kader, tokoh agama, PKK, karang taruna, sekolah, dan perangkat desa), yang dapat merancang pesan kesehatan yang kontekstual dengan nilai dan bahasa lokal. Koalisi ini dapat berfungsi sebagai pusat komunikasi sosial desa dalam mendukung program percepatan penurunan angka stunting.

Integrasi Pendekatan Ekologi Sosial dalam Kebijakan Desa

Hingga kini, sebagian besar program penanggulangan stunting di tingkat desa masih berfokus pada aspek gizi dan infrastruktur fisik, seperti pemberian makanan tambahan dan pembangunan sanitasi. Namun, tanpa dukungan komunikasi sosial yang terencana, intervensi tersebut sering kali tidak berkelanjutan dan kurang berdampak pada perilaku keluarga. Pendekatan Ekologi Sosial (*Social Ecological Model*) menawarkan kerangka yang lebih komprehensif, dengan mengaskan bahwa perubahan perilaku individu hanya akan terjadi jika lingkungan sosialnya mendukung (McLeroy *et al.* 1988).

Dalam kerangka ini, kebijakan desa perlu diarahkan tidak hanya untuk menargetkan individu, tetapi juga memperkuat jejaring komunikasi lintas level, mulai dari keluarga, komunitas, lembaga, hingga kebijakan lokal. Pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai enabler komunikasi sosial, yaitu menciptakan regulasi, ruang, dan sumber daya yang memungkinkan komunikasi perubahan perilaku berlangsung secara berkelanjutan. Peran ini dapat diwujudkan melalui instrumen kebijakan desa yang konkret, seperti penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pencegahan Stunting

Berbasis Keluarga, penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa tentang Tim atau Forum Komunikasi Stunting Desa, serta pengarusutamaan strategi komunikasi multilevel dalam Rencana Aksi Desa (RAD Stunting dan pengalokasian Dana Desa).

Secara operasional, regulasi tersebut dapat mendukung pelaksanaan pelatihan komunikasi interpersonal bagi kader Posyandu, pembentukan forum komunikasi komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat dan keluarga sasaran, serta pengembangan media komunikasi lokal seperti papan informasi desa, media sosial desa, atau radio komunitas. Dengan demikian, kebijakan desa tidak lagi bersifat programatik dan temporer, melainkan membentuk ekosistem kebijakan partisipatif yang mendorong kolaborasi lintas aktor dan keberlanjutan perubahan perilaku. Dalam kerangka ini, komunikasi diposisikan bukan sekadar kegiatan penyuluhan, tetapi sebagai strategi pembangunan sosial yang memperkuat kapasitas komunitas untuk mencegah stunting dari dalam.

Rekomendasi

Upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia membutuhkan strategi komunikasi yang lebih dari sekadar penyuluhan. Komunikasi harus dilihat sebagai proses sosial yang membentuk perilaku keluarga dan masyarakat secara sistemik. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Gedepangrango, Kabupaten Sukabumi, serta kerangka pendekatan *Social Ecological Model*, terdapat empat arah kebijakan strategis yang dapat diambil untuk memperkuat efektivitas komunikasi dalam pencegahan stunting.

Pertama, memperkuat komunikasi keluarga sebagai pusat perubahan perilaku. Keluarga merupakan lingkungan terdekat yang menentukan pola makan, pola asuh, dan kebiasaan kesehatan anak. Program edukasi gizi perlu disertai dengan pelatihan komunikasi keluarga sehat yang mendorong orang tua untuk berdialog, saling mendengarkan, dan membuat keputusan pengasuhan secara bersama. Pemerintah daerah dapat mengintegrasikan pelatihan ini ke dalam kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dan kelas ibu hamil yang telah berjalan di masyarakat. Dengan

pendekatan ini, komunikasi bukan lagi sekadar menyampaikan pesan, tetapi membangun kesadaran dan komitmen keluarga terhadap praktik gizi yang lebih baik.

Kedua, meningkatkan kompetensi komunikasi interpersonal dan digital kader Posyandu. Kader merupakan ujung tombak perubahan perilaku di tingkat rumah tangga, namun sebagian besar belum memiliki keterampilan komunikasi yang memadai. Dinas Kesehatan dan Puskesmas perlu menyelenggarakan pelatihan komunikasi interpersonal berbasis empati, *storytelling*, dan teknik mendengarkan aktif agar pesan kesehatan dapat diterima dengan lebih baik oleh masyarakat. Selain itu, pelatihan komunikasi digital juga diperlukan agar kader dapat menggunakan media sosial seperti WhatsApp, TikTok, atau Facebook sebagai sarana edukasi gizi yang menarik dan relevan bagi generasi muda. Dengan penguatan kapasitas ini, kader akan lebih percaya diri, komunikatif, dan mampu menjadi fasilitator perubahan perilaku di lingkungan masyarakatnya.

Ketiga, mendorong terbentuknya Koalisi Komunikasi Komunitas Sehat di tingkat desa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi kesehatan tidak hanya bergantung pada kader, tetapi juga pada dukungan tokoh masyarakat dan norma sosial yang hidup di komunitas. Pemerintah desa bersama PKK, tokoh agama, karang taruna, dan guru PAUD dapat membentuk forum komunikasi lintas peran yang berfungsi merancang, menyebarkan, dan memantau pesan-pesan kesehatan berbasis budaya lokal. Kegiatan sosial dan keagamaan, seperti pengajian, arisan, atau kegiatan gotong royong, dapat menjadi sarana efektif untuk menghidupkan pesan gizi di tengah masyarakat. Dengan adanya koalisi ini, pesan kesehatan menjadi bagian dari identitas sosial desa, bukan sekadar kampanye sementara.

Keempat, mengintegrasikan pendekatan ekologi sosial ke dalam kebijakan dan perencanaan desa. Pemerintah desa memiliki posisi strategis dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung perilaku sehat. Oleh karena itu, strategi

komunikasi multilevel perlu dimasukkan secara eksplisit dalam Rencana Aksi Desa (RAD) Stunting dan dialokasikan melalui Dana Desa. Penggunaan dana ini dapat difokuskan pada kegiatan seperti pelatihan komunikasi kader, pembentukan forum komunikasi komunitas, serta pengembangan media komunikasi lokal seperti papan informasi desa atau radio komunitas. Lebih jauh lagi, sistem pemantauan desa dapat diperkuat dengan indikator perubahan perilaku, bukan hanya jumlah kegiatan atau penerima manfaat. Pendekatan ini akan memastikan bahwa kebijakan desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mendorong transformasi sosial yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Penurunan angka stunting tidak dapat dicapai hanya dengan pendekatan gizi dan kesehatan semata. Di balik setiap pertumbuhan anak yang terhambat, terdapat lingkungan komunikasi yang belum efektif, seperti misalnya keluarga yang kurang berdialog, kader yang belum percaya diri menyampaikan pesan, komunitas yang belum menjadi ruang belajar sosial, serta kebijakan desa yang belum sepenuhnya mendukung proses komunikasi lintas level. Karena itu, stunting sesungguhnya bukan hanya persoalan gizi, melainkan juga persoalan sosial dan komunikasi publik yang memerlukan solusi sistemik.

Pendekatan Ekologi Sosial (*Social Ecological Model*) memberikan kerangka strategis untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Dengan memandang komunikasi sebagai proses multilevel, yang menghubungkan individu, keluarga, komunitas, organisasi, dan kebijakan, upaya perubahan perilaku dapat berjalan lebih konsisten dan berkelanjutan. Bukti dari penelitian lapangan di Desa Gedepangrango menunjukkan bahwa ketika komunikasi antarlevel ini terbangun, keluarga lebih mampu menerapkan perilaku sehat, kader lebih efektif dalam penyuluhan, dan masyarakat lebih siap menjadi bagian dari gerakan sosial melawan stunting.

Oleh karena itu, pemerintah daerah dan desa perlu menempatkan komunikasi sosial berbasis pendekatan ekologi sosial sebagai pilar utama dalam strategi percepatan penurunan stunting. Penguatan kapasitas keluarga, kader, dan komunitas, serta integrasi komunikasi multilevel dalam kebijakan desa, akan menciptakan ekosistem sosial yang saling menguatkan dalam membangun perilaku gizi yang sehat. Jika langkah ini dilakukan secara terencana dan kolaboratif, Indonesia tidak hanya akan menurunkan prevalensi stunting, tetapi juga membangun generasi yang tumbuh dalam lingkungan yang sehat, komunikatif, dan berdaya.

Dengan demikian, *policy brief* ini menegaskan bahwa komunikasi bukan pelengkap dalam kebijakan stunting, melainkan inti dari perubahan sosial yang berkelanjutan. Saat kebijakan mulai berbicara dengan bahasa masyarakat, dan masyarakat mulai berkomunikasi dengan kesadaran kolektif, maka perubahan perilaku yang diharapkan bukan lagi impian, melainkan kenyataan.

Daftar Pustaka

- Fajar NA, Zulkarnain M, Taqwa R, Sulaningsi K, Ananingsih ES, Rachmayanti RD, Siau CS. 2024. Family roles and support in preventing stunting : A Systematic Review. 19(1).doi:10.14710/jpki.19.1.50-57.
- Febrian MW, Rohmah AN. 2025. Komunikasi interpersonal dalam kegiatan. 13(1):1–15.
- Hidayat T, Febriana A, Widniah AZ. 2023. Pencegahan terjadinya masalah stunting komunikasi antar personal prevention of stunting problems in the family through the approach. 7(1):19–26.
- McLeroy KR, Bibeau D, Steckler A, Glanz K. 1988. Ecological perspective on promotion programs. *Health Educ. Q.* 15(4).doi:10.1177/109019818801500401.
- Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. 2025. Prevalensi stunting indonesia turun ke 19,8%. *Kementrian Sekr. Negara Republik Indonesia*.



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Susri Adeni, merupakan dosen Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University. (*Corresponding Author*)
Email: susriadeni@apps.ipb.ac.id



Sarwititi Sarwoprasodjo, adalah ketua Program Studi Pascasarjana Komunikasi Pembangunan, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University



Mudrikatul Jannah Djibu, adalah Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University.



Ivone Mada Injili Papuani Bisararisi, adalah mahasiswa Pascasarjana Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University.

ISSN 2828-285X



Telepon
+62 811-1183-7330



Email
dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat
Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680